

Judul : Mencari Figur Sempurna Pengganti Sempurna
Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 11

I CALON ANGGOTA BPK I

MENCARI FIGUR SEMPURNA PENGGANTI SEMPURNA

Wakil rakyat tengah berburu figur ideal untuk menempati dua kursi kosong di Badan Pemeriksa Keuangan. Sebanyak 16 nama ditetapkan sebagai kandidat, yang salah satunya bakal duduk di kursi empuk pimpinan tertinggi lembaga auditor eksternal tersebut, menggantikan Agung Firmansampurna.

Kemarin, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengumumkan nama-nama tersebut. Ke-16 kandidat yang mengisi dua kursi kosong yang telah direbutkan oleh 16 nama tersebut adalah Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua BPK.

Tetapi kami telah meniang 16 nama, salah satunya untuk posisi Ketua BPK, kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dede Oef kepada Remis, Selasa (18/1).

Latar belakang dan kandidat pun cukup beragam. Mulai dari pegawai negeri sipil (PNS) di lembaga keuangan, hingga pejabat karier BPK. Tidak sedikit pula dari kalangan profesional.

Celakanya, lagi-lagi kandidat yang berasal dari partai politik (partai) masih mendominasi. Mereka adalah Kristiawanto dan Didi Apriadi yang pernah menuhi karier politik di Partai Hanura. Kemudian, Anggota

Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Haerul Saleh, dan Isma Yaton dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Nama terakhir merupakan Anggota IV BPK yang masa jabatannya berakhir 2022.

Dengan kata lain, Isma kembali maju sebagai calon untuk melenggang posisinya di lembaga auditor eksternal pemerintah tersebut. Hal ini pun menegaskan utusan-utusan partai masih berambisi untuk menduduki jabatan strategis.

Salah satunya adalah Ach-sinul Oesasi, Anggota III BPK yang dikenal sebagai salah satu kader Partai Demokrat. Nama lain adalah almarhum Harry Azhar, Anggota V BPK yang merupakan kader Partai Golkar.

Selain itu, Plus Luslustrang yang menjabat sebagai Anggota II BPK berasal dari Partai

Gerindra, serta Dwiell Lumban Tobing dari PDI Perjuangan sebagai Anggota VII BPK.

Sesungguhnya, bukan sebuah larangan politikus Parlemen hingga di seberang jalan, lokasi Kantor Pusat BPK, UU No. 15/2006 tentang BPK pun tidak melarang kader partai untuk maju sebagai kandidat.

Akan tetapi, tidak sedikit kekhawatiran yang menumpuk di benak publik perihal adanya kepentingan politik apabila kader partai menjabat sebagai auditor negara.

Pengantar Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Ferdian Andi berpendapat, masuknya kader partai politik dalam rekrutmen calon anggota BPK sebagai konsekuensi dari regulasi yang memberi ruang bekas politikus meruduri menjadi anggota BPK.

"UU No. 15/2006 tidak mengatur batas minimal anggota yang partai politik mendaftar menjadi anggota BPK. Haru-

nya ada batas minimal berapa tahun seseorang bekas anggota partai, baru diperkenankan mendaftar sebagai anggota BPK," ujar Ferdian.

Akibat ketiadaan aturan tersebut, Ferdian menilai BPK dianggap sebagai lembaga pensuunan politisi atau bekas anggota DPR.

Ferdian menambahkan, akan lebih baik apabila pemerintah dan DPR mendesain ulang regulasi yang mengatur tata cara pemilihan Anggota BPK sehingga lebih independen dan terbebas dari kepentingan politik praktis.

Terlebih, perubahan UU BPK sempat masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas pada 2021 kendati kemudian ditangguhkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas permintaan Komisi XI.

"Perlu ada instrumen hukum yang menjaga independensi BPK, mulai proses administrasi sampai uji kelayakan," ujarnya.

Pada pengujung tahun lalu

revisi UU BPK dijadwalkan masuk ke dalam Prolegnas 2022. Namun lagi-lagi dibatalkan oleh Baleg atas permintaan Komisi XI, yang telah membuka pendaftaran Anggota BPK.

Sementara itu, sumber *Bisnis* di pemerintahan mengungkap, dibatalkannya revisi UU BPK disebabkan adanya kegaduhan lantaran pemerintah dan DPR berencana menghapus pasal tertentu, yakni yang mengatur masa jabatan Ketua BPK yakni menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Dinamika ini makin menegaskan bahwa intrik politik masih cukup kental. Ini pun tak bisa dihindari mengingat berbagai kebijakan yang dikeluarkan di negara ini berasal dari negosiasi politik. Akan tetapi, eksekusi dan legislasi hendaknya bisa menyiapkan taktik untuk tetap meminimalisasi kepentingan politik dan menjaga independensi BPK. ■



- | | | |
|--|---|--|
| <p>1 Priyono Duri Muorohe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan terakhir S-2 • PNS di BPKP • Unit Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan pengawasan | <p>6 Dori Santosa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditor Utama BPK • Pernah menjabat Pimpinan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur | <p>11 Syafril Adnan Baharudin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernah menjabat Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan • Pernah menjabat Direktur Keuangan Daerah BPKP • Pernah menjabat Duta Besar RI untuk WTO di Jenewa |
| <p>2 Kristiawanto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan terakhir S-3 • Founder DR. Kristiawanto & Partners • Pernah aktif di Partai Hanura | <p>7 Moza Pandawa Sakti</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNS di Kementerian Keuangan • Sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan | <p>12 Dadang Suwanda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernah berkarier di Kementerian Keuangan • Auditor BPKP • Pernah berkarier di Kementerian Dalam Negeri • Dosen IPDN |
| <p>3 Haerul Saleh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra • Dewan Penasihat Peradi Kabupaten Kolaka (2008) • Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Himpi Sulawesi Tenggara (2013) | <p>8 Yves S. Palambang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan • Project Manager di PT Ito Taka Construction | <p>13 Didi Apriadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengusaha, pekat teknologi Informasi, aktivis sosial • Pernah aktif di Partai Hanura |
| <p>4 Osbal Saragi Rumahorbo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman sebagai bankir 30 tahun • Pernah menjabat Direktur Bank Rakyat Indonesia • Pernah menjabat Direktur Bank Negara Indonesia | <p>9 Kukuh Prionggo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernah menjabat Kepala BPK RI Perwakilan Papua • Pernah menjabat Pemeriksa Madya Auditorat Keuangan Negara VI | <p>14 Adrin Guntura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan senior di BPKP • Pernah ditempatkan di Perwakilan BPKP DKI Jakarta |
| <p>5 Isma Yaton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota BPK (sejak April 2017-sakarang) • Anggota Komisi X DPR RI dan Badan Anggaran • Politikus PDI Perjuangan | <p>10 Blucer W. Rajagukguk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernah menjabat Kepala BPK RI Perwakilan Papua • Pernah menjabat Kepala Auditoriat V.A • Pernah menjabat Kepala BPK RI Perwakilan DKI Jakarta | <p>15 Firmansyah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan pajak |
| | | <p>16 Rachmat Manggala Purbu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Manajemen • Direktur Utama PT Rejajesa Mitra Persada Indonesia |